

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dewasa ini perbincangan mengenai sampah plastik sering menjadi topik utama, baik itu di media sosial maupun komunikasi secara langsung. Tercatat dalam Badan Pusat Statistik (BPS) per February 2022 sampah plastik di Indonesia mencapai 64 juta ton/tahun, hal ini tentu saja akan menjadi *boomerang* di masa yang akan datang bagi masyarakat akibat sampah plastik yang ada. *Boomerang* yang dimaksud bisa berupa banjir dan pemanasan global. Berdasarkan hal itu, tidak sedikit organisasi yang ikut serta dalam melakukan pengelolaan sampah plastik untuk mencegah segala sesuatu yang tidak diinginkan oleh semua orang. Kabupaten Buleleng merupakan salah satu Kabupaten yang tercatat memiliki beberapa organisasi pengelolaan sampah plastik. Pengelolaan sampah plastik ini disebut dengan *Bank Sampah*, organisasi yang meluncurkan program bank sampah diantaranya :

Tabel I.1
(Nama Organisasi Bank Sampah)

No	Nama Organisasi	Alamat
1	Bank Sampah Bumi Sejati	Desa Poh Bergong
2	Bank Sampah Galang Panji	Desa Panji
3	Bank Sampah Kaliber	Desa Anturan
4	Go Bank Sampah	Desa Banyuning
5	Bank Sampah Gerbangsih	Desa Sangsit
6	Bank Sampah Beratan Berseri	Kelurahan Beratan

Sumber : (dlh.bulelengkab.go.id)

Dari data diatas tidak semua organisasi bank sampah termasuk ke dalam kategori organisasi nirlaba. Organisasi nirlaba merupakan organisasi yang dalam pelaksanaan programnya menggunakan sumber daya yang berasal dari masyarakat

sekitar (Christin et al., 2018). Organisasi atau lembaga nirlaba memiliki karakteristik yang sangat spesifik, hal ini dapat membedakan antara organisasi nirlaba dan organisasi yang berorientasi pada laba. Karakteristik pembeda ini terdapat pada cara organisasi nirlaba memperoleh sumber daya yang dibutuhkan untuk melakukan berbagai aktivitas operasionalnya (Marlinah & Ibrahim, 2018). Biasanya, organisasi nirlaba akan memperoleh sumber daya berupa modal dari sumbangan para anggota dan para penyumbang lain yang tidak mengharapkan imbalan apapun dari organisasi nirlaba tersebut (Natsir & Bangun, 2021). Dari definisi diatas, dapat disimpulkan cara yang digunakan untuk melihat apakah organisasi tersebut termasuk ke dalam organisasi nirlaba adalah dengan memperhatikan struktur modal yang diperoleh. Struktur modal yang dimiliki oleh setiap organisasi nirlaba adalah dana dari donatur dan penyumbang lainnya (masyarakat sekitar).

Berdasarkan data yang disajikan, setiap organisasi pengelola bank sampah tentu memiliki keunikan dan visi misi yang berbeda (Natsir & Bangun, 2021). Hal ini terlihat jelas dalam tujuan organisasi tersebut, misalnya dalam organisasi Bank Sampah Galang Panji dan Go Bank Sampah. Kedua organisasi itu memberikan kebebasan kepada siapapun untuk menjual sampah plastik sehingga bagi mereka yang melakukan transaksi akan mendapatkan sebuah imbalan berupa dana untuk keperluan pribadinya (Agustini, 2018). Tujuan dilakukannya program bank sampah adalah untuk meningkatkan perekonomian warga sekitar maupun warga lain yang ikut serta menjual sampah plastik yang dimiliki. Berbeda dengan organisasi Sekala Bali, kegiatan yang dilakukan oleh Sekala Bali bukan terfokus pada meningkatkan perekonomian warga setempat akan tetapi lebih kepada *social*

education (pendidikan sosial). Sekala Bali merupakan singkatan dari Sekolah Alam Bali yang terletak di Jalan Setiabudi Banjar Penarungan Kelurahan Penarukan Kabupaten/Kecamatan Buleleng-Bali. Sekala Bali merupakan organisasi yang ikut serta dalam melakukan pengelolaan sampah plastik serta meluncurkan program-program dengan tujuan mengurangi sampah plastik yang ada di sekitarnya. Walaupun memiliki perbedaan berdasarkan tujuannya, akan tetapi Sekala Bali secara tidak langsung diberikan pendapatan dari hasil penjualan bank sampah untuk menunjang kegiatan sosialnya.

Menurut *founder* Sekala Bali Singaraja, pendapatan yang ada adalah pendapatan yang diperoleh dari hasil penjualan sampah atas kegiatan *social education* yang dilakukan. Pendapatan bank sampah ini di dapatkan setiap satu (1) bulan sekali, hal ini dikarenakan proses pengumpulan sampah dilakukan pada minggu pertama bulan berikutnya. Sampah yang dikumpulkan berupa sampah plastik dan sampah kertas, setiap siswa/i wajib membawa 1 Kg sampah yang sudah dipilah. Apabila pada minggu pertama siswa/i membawa sampah kurang dari 1 Kg, pihak Sekala Bali memberikan keringanan untuk membawa sampah di pertemuan berikutnya. Hasil penjualan bank sampah bukan menjadi keuntungan bagi pihak *founder*, anggota maupun organisasi itu sendiri tetapi, pendapatan bank sampah akan masuk ke kas organisasi dan digunakan sebagai penjunjang kegiatan operasional Sekala Bali. Adanya program bank sampah di Sekala Bali selain memberikan pendidikan secara gratis adalah untuk mendukung peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah provinsi Bali yaitu Peraturan Gubernur (Pergub) No. 97 Tahun 2018 tentang pelarangan penggunaan plastik sekali pakai.

Pendapatan bank sampah yang dimiliki oleh Sekala Bali bukan menjadi

satu-satunya penunjang kegiatan program yang dijalankan, salah satu pendapatan selain dari penjualan bank sampah adalah pendapatan yang diperoleh melalui donatur. Donatur merupakan mereka yang menyumbangkan dana kepada pihak yang membutuhkan (Widyawati et al., 2017), namun di Sekala Bali Singaraja definisi donatur bukan hanya mereka yang memberikan sumbangan dalam bentuk materi. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi awal, *founder* Sekala Bali memberikan keterangan bahwa donatur yang ada di Sekala Bali ada dua jenis yaitu donatur yang menyumbangkan dalam bentuk materi dan donatur yang menyumbangkan dalam bentuk non-materi. Contoh dari donatur non-materi adalah donatur yang memberikan sumbangan berupa meja tulis, alat tulis, papan tulis dan penunjang kegiatan belajar mengajar lainnya. Selain itu, donatur yang memberikan sumbangan berupa tenaga juga dilakukan oleh Sekala Truna Truni banjar penarungan dengan melakukan kegiatan sosial untuk mengajar kepada siswa/i Sekala Bali tanpa mengharap imbalan apapun. Dalam hal ini jenis donatur yang ada pada organisasi Sekala Bali ialah donatur kegiatan sosial, setiap donatur memiliki hak dan kewajiban sebagai organisasi adalah memenuhi hak dari donatur itu sendiri. Hak yang dimaksud yaitu (1) pihak donatur mengetahui visi, misi serta tujuan didirikannya organisasi; (2) mengetahui struktur organisasi pengurus; (3) menerima laporan keuangan secara transparansi, dengan adanya hak yang diberikan maka donatur memberikan rasa kepercayaan terhadap sebuah organisasi.

Pada dasarnya, donatur akan memberikan keleluasan terhadap pengelola organisasi dalam menggunakan sumbangan yang diberikan untuk keperluan kegiatan Sekala Bali bukan untuk keperluan pribadi. Namun, walaupun Sekala

Bali merupakan organisasi nirlaba akan tetapi laporan penggunaan dana yang diperoleh dari hasil penjualan sampah dan sumbangan dari para donatur juga diperlukan untuk mengetahui arus kas yang keluar ataupun masuk sehingga pengelola maupun donatur mengetahui perkembangan organisasi yang dibangunnya. Laporan pertanggungjawaban akan digunakan sebagai pengambil sebuah keputusan bagi penggunaannya (Widyawati et al., 2017), dalam akuntansi laporan pertanggungjawaban yang disusun oleh setiap organisasi disebut dengan akuntabilitas. (Triputri et al., 2017) Akuntabilitas merupakan suatu pertanggungjawaban yang diberikan kepada pihak yang terlibat dalam tindakan tertentu untuk bertanggung jawab dalam sekelompok orang atau dalam suatu organisasi. Akuntabilitas sangat dibutuhkan bagi setiap organisasi baik organisasi *profit* maupun organisasi *non-profit* termasuk organisasi keagamaan karena setiap organisasi mempunyai keterkaitan dengan pihak internal atau eksternal organisasi (Rahman, 2015) . Menurut Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) tahun 2005 mendefinisikan bahwa akuntabilitas merupakan mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. (Kumalawati & Atmadja, 2020) akuntabilitas dapat didefinisikan menjadi suatu konsep yang mewajibkan setiap organisasi untuk melakukan pertanggungjawabkan penggunaan segala sumber daya serta kinerjanya yang telah direalisasikan secara nyata kepada publik dengan terbuka, dengan adanya sifat bertanggungjawab dari *founder*/pemilik maka akan menimbulkan rasa percaya yang tinggi oleh para *stakeholder*.

Laporan pertanggungjawaban atau akuntabilitas yang diberikan oleh pihak

organisasi kepada donatur memberikan sinyal apakah pengelolaan keuangan yang dilakukan sudah baik atau belum (Wati, 2021). Dari sinyal tersebut maka donatur bisa memberikan sebuah keputusan atas sumbangan yang dilakukan pada masa mendatang, hal inilah yang menyebabkan setiap organisasi harus memiliki laporan keuangan atas pengelolaan keuangan yang dilakukan. Dalam Sekala Bali, pengelolaan keuangan yang terjadi adalah berupa pengelolaan atas penerimaan kas dari hasil penjualan sampah dan donatur serta pengeluar kas berupa kegiatan atas program-program yang ada. Dari hasil observasi awal., penelitian ini penting untuk dilakukan karena berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan di lapangan ditemukan adanya beberapa permasalahan yang terjadi di organisasi nirlaba Sekala Bali. Permasalahan yang terjadi yaitu tentang pengelolaan keuangan atas penerimaan dan pengeluaran kas yang belum seimbang. Hal ini dikarenakan pada saat adanya suatu kegiatan, organisasi Sekala Bali tidak membuat rancangan anggaran yang menyebabkan adanya pengeluaran tidak terduga.

Tidak hanya terkait masalah pengelolaan keuangan saja, pengelola organisasi Sekala Bali jarang melaporkan secara tertulis penggunaan dana dari donatur, berdasarkan hal tersebut terindikasi adanya praktik akuntabilitas yang belum terlaksana dengan baik, sehingga perlu dilakukan penelitian yang lebih dalam agar bisa mengungkap bagaimana pengelolaan keuangan dan akuntabilitas dari organisasi nirlaba Sekala Bali. Tidak maksimalnya praktik akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan dan program yang dijalankan didasari atas kurangnya sumber daya dan pengetahuan terkait dengan laporan keuangan yang dimiliki oleh Sakala Bali Singaraja. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi awal bahwa pertanggungjawaban yang diberikan Sekala Bali kepada penerima

informasi hanya berupa laporan penerimaan dan pengeluaran kas saja, jika dibandingkan dengan PSAK No.45 yang mengatur tentang organisasi nirlaba, pada umumnya menyajikan empat (4) laporan keuangan yaitu neraca, arus kas, aktivitas kas dan catatan atas laporan keuangan. Tetapi, karena kurangnya sumber daya manusia yang dimiliki oleh Sekala Bali menjadi kekurangan dalam menyajikan laporannya. Disamping itu, pengetahuan terkait laporan keuangan juga diperlukan untuk menyusun sebuah laporan sesuai dengan PSAK yang berlaku. Namun pada kenyataannya, Sekala Bali belum menerapkan hal tersebut.

Walaupun pada dasarnya akuntabilitas dari Sekala Bali belum sesuai dengan PSAK No. 45 tetapi pertanggungjawaban yang diberikan oleh Sekala Bali dituangkan kedalam web Sekala Bali Singaraja. Web yang dimiliki Sekala Bali bisa diakses kapanpun dan dimanapun tanpa ada batasan pengaksesan. Dengan kemudahan akses ini dapat memberikan kepercayaan kepada para donatur terhadap pengelolaan keuangan yang dilakukan. Keunikan inilah yang menjadi acuan para *stakeholder* memberikan sumbangan kepada Sekala Bali disamping legalitas yang seharusnya dimiliki.

Penelitian lain yang menjadikan organisasi nirlaba sebagai objek penelitian ialah penelitian yang dilakukan oleh (Wati, 2021). Dalam penelitian tersebut organisasi nirlaba yang diteliti adalah *sekaa santhi* dengan subjek pengelolaan keuangan atas pendapatan yang diperoleh. Pengelolaan keuangan pada *seka santhi* yang diteliti berdasarkan kegiatan keagamaan. Keuangan yang diperoleh digunakan sebagai penunjang kegiatan utama keagamaan seperti piodalan, upacara manusia yadnya dan lain-lain. Perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah, pada penelitian sebelumnya

menggunakan objek *sekaa santhi* yang melakukan kegiatan keagamaan sedangkan pada penelitian ini menggunakan sekala bali yang kegiatan utamanya adalah *social education*. Perbedaan kedua adalah, pada penelitian yang dilakukan oleh (Wati, 2021) subjek penelitiannya adalah pendapatan *batu-batu* sedangkan pada penelitian ini subjek yang diteliti ialah pendapatan yang diperoleh melalui bank sampah dan donatur. Persamaan dari kedua penelitian ini adalah sama-sama meneliti bagaimana pengelolaan keuangan dari organisasi nirlaba yang digunakan sebagai objek penelitian.

Penelitian yang berkaitan dengan akuntabilitas dilakukan oleh (Yani, 2021). Pada penelitian tersebut menyatakan bahwa akuntabilitas pada yayasan berbasis konsep *social entrepreneurship* (kewirausahaan sosial) hal ini ditunjukkan dengan terlaksananya program sosial yayasan seperti pembuatan kaski palsu dan pemberdayaan disabilitas melalui sebagian dari keuntungan dan aktivitas ekonomi pada unit usaha. Adapun persamaan dari penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama meneliti prinsip akuntabilitas pada organisasi nirlaba yang digunakan sebagai objek penelitian. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini dilakukan pada tahun 2022, dengan objek penelitian Sekolah Alam Bali yang merupakan organisasi nirlaba dengan perolehan pendapatan untuk dikelola melalui Bank Sampah dan Donatur. Sedangkan penelitian sebelumnya mengambil objek di Yayasan Kaki Kita berlokasi di Sukasada. Selain itu, perbedaan kedua adalah pada penelitian yang dilakukan oleh (Yani, 2021) objek penelitian meluncurkan program dengan berbasis kewirausahaan sosial sedangkan pada penelitian ini meluncurkan program berbasis pendidikan sosial. (Mahendra et al., 2017) juga meneliti mengenai

akuntabilitas atas pengelolaan dana berupa sesari di Pura Kahyangan Jagat Ponjok Batu. Dalam penelitian tersebut menyebutkan bahwa akuntabilitas yang dilakukan oleh pengempon (pengelola pura) Pura Ponjok Batu termasuk kedalam akuntabilitas vertical, dimana tanggungjawab pengelolaan dana terhadap otoritas yang lebih tinggi (akuntabilitas pengempon kepada ketua pengelola). Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh (Mahendra et al., 2017) adalah sama-sama meneliti akuntabilitas atas pengelolaan dana atau keuangan. Sedangkan perbedaannya adalah, dalam penelitian ini melakukan penelitian menggunakan akuntabilitas horizontal dimana tanggungjawab organisasi terhadap masyarakat dan lingkungan eksternalnya, namun pada penelitian sebelumnya menggunakan jenis akuntabilitas vertical.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul ***“Mengungkap Pengelolaan Keuangan dan Akuntabilitas atas Pendapatan Pada Organisasi Nirlaba Sekala Bali Singaraja.”***

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat dirumuskan beberapa identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Dalam pengelolaan keuangan berupa pengeluaran kas, pengelola Sekala Bali tidak membuat rancangan anggaran biaya di setiap kegiatannya.
2. Praktik Akuntabilitas dari organisasi Sekala Bali belum maksimal.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang terdapat pada *Sekala Bali*

Singaraja maka peneliti membatasi permasalahan pada pengelolaan keuangan atas pendapatan bank sampah dan donatur di Sekala Bali Singaraja.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dipaparkan, adapun rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh Sekala Bali sebagai organisasi nirlaba ?
2. Bagaimana akuntabilitas organisasi nirlaba Sekala Bali dalam pengelolaan keuangannya ?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun di atas, adapun tujuan penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh Sekala Bali Singaraja.
2. Untuk mengetahui akuntabilitas dari pengelolaan keuangan Sekala Bali Singaraja.

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi baik terhadap penulis maupun pihak berkepentingan lainnya. Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu :

- a. Manfaat Teoritis

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai

pentingnya pengelolaan keuangan bagi organisasi nirlaba khususnya di Sekala Bali Singaraja. Selain itu diharapkan pula dari hasil penelitian ini dapat dijadikan tambahan referensi pustaka.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi Organisasi Nirlaba Sekala Bali.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan juga sebagai bahan masukan bagi pengelola Sekala Bali, sehingga kedepannya dapat menjalankan program-program dengan tetap memperhatikan praktik akuntabilitas sehingga tidak adanya penyimpangan dalam pengelolaan Sekala Bali dan pengelolaan organisasi yang tepat sangat diperlukan untuk memberikan kepercayaan yang lebih kepada donatur maupun masyarakat.

2. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai praktik akuntabilitas pengelolaan Sekala Bali dengan berbasis konsep *social education* (pendidikan sosial), sehingga bagi masyarakat yang ingin mendirikan organisasi sejenis dapat menjadikannya bahan pertimbangan untuk memperoleh sumber dana mandiri maupun kepada donatur.

3. Bagi Penelitian Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan atau referensi jika tertarik dalam meneliti mengenai sistem pengelolaan organisasi nirlaba yang berkaitan dengan praktik akuntabilitas dalam pengelolaan

organisasi berbasis konsep *social education* (pendidikansosial).

